

ISSN 1979-5394

# TITIK-TEMU

## JURNAL DIALOG PERADABAN

Volume 6, Nomor 1, Juli - Desember 2013

Diterbitkan oleh Nurcholish Madjid Society (NCMS)

Sekretariat: Nurcholish Madjid Society

Graha STR, Lt. 4, Jl. Ampera Raya No. 11, Kemang  
Jakarta Selatan 12550

E-mail: titik.temu@yahoo.com

### **Pemimpin Redaksi**

Kautsar Azhari Noer

### **Wakil Pemimpin Redaksi**

Muhamad Wahyuni Nafis

### **Sekretaris Redaksi**

Fachrurozi • Rahmat Hidayatullah

### **Redaktur Pelaksana**

Sunaryo

### **Dewan Redaksi**

Budhy Munawar-Rachman • Fachrurozi • Kautsar Azhari Noer •  
Moh. Monib • Muhamad Wahyuni Nafis • Rahmat Hidayatullah •  
Sunaryo • Yudi Latif • Zainun Kamal

### **Pewajah Sampul**

Taqi Kanara

### **Pewajah Isi**

Moh. Syu'bi

*Titik-Temu* terbit setiap enam bulan. Redaksi menerima tulisan ilmiah dari kalangan manapun dan berhak menyunting, memperbaiki dan menyempurnakan naskah tulisan yang diterima. Naskah tulisan berkisar antara 15-25 halaman ukuran A-4 dengan ketikan spasi ganda dan dikirim via e-mail.

ISSN 1979-5394

# TITIK-TEMU

JURNAL DIALOG PERADABAN

Volume 6, Nomor 1, Juli - Desember 2013

## DAFTAR ISI

Pedoman Transliterasi	1
Daftar Surat al-Qur'an	3-4
Hadis Qudsi: Nasihat Allah kepada Para Hamba-Nya	5-6
Pengantar	7-15

### SAJIAN KHUSUS

Kelangsungan dan Peningkatan Pembangunan Bangsa dalam Era Reformasi <i>Nurcholish MadjidMadjid</i>	19-33
Relevansi Pemikiran Nurcholish Madjid untuk Pembangunan Bangsa <i>Andi Faisal Bakti</i>	35-49

### ARTIKEL

Agama, Konflik, dan Kekerasan <i>Trisno S. Sutanto</i>	53-61
Kebebasan dan Egalitarianisme dalam Teori Rawls <i>Sunaryo</i>	63-83
Tantangan Mendidik Generasi Berkarakter di Abad 21 <i>Muhamad Wahyuni Nafis</i>	85-101

DAFTAR ISI

Pengembangan Psikologi Moral dalam Tradisi Sufi: Sebuah Introduksi untuk <i>al-Ri'āyah</i> al-Muhasibi <i>Kautsar Azhari Noer</i>	103-131
Yoga: Cara Meraih Kemenangan <i>Paramahansa Yogananda</i>	133-151

**RESENSI BUKU**

Menggiatkan Dialog Teologis antara Kristen dan Islam <i>Ursula King</i>	155-157
Mutiara Hikmah Para Kekasih Allah <i>Abmad Fitriyadi</i>	159-164

**MAKLUMAT**

Susunan Pengurus Nurcholish Madjid Society	167-168
Ucapan Terima Kasih	169
Berlangganan <i>Titik-Temu</i>	170

# RELEVANSI PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID DALAM PEMBANGUNAN BANGSA INDONESIA

*Andi Faisal Bakti*

Pembangunan pada hakikatnya adalah suatu proses perubahan yang bertujuan mencapai kemakmuran dan keadilan dalam masyarakat suatu negara. Titik berat pembangunan nasional seharusnya berlandaskan cita-cita terwujudnya masyarakat mandiri yang dapat melakukan pembangunan berdasarkan kekuatan sendiri. Titik berat pembangunan tersebut dicapai melalui pembangunan mutu manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya. Sebagai Muslim Indonesia, sudah seharusnya kita menjaga kekayaan dan khazanah negeri ini untuk meningkatkan pembangunan bangsa dengan berbagai cara yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tulisan Nurcholish Madjid, yang akrab dipanggil Cak Nur, dalam makalah yang disajikannya untuk Klub Kajian Agama Paramadina yang berjudul “Kelangsungan dan Peningkatan Pembangunan Bangsa dalam Era Reformasi” layak direnungkan bersama.

Ada beberapa hal yang mendasari pemikiran Cak Nur dalam tulisan tersebut yang patut kita telaah.

## **Perubahan Sosial**

Dalam kajian komunikasi internasional, masalah lokus perubahan sosial telah menjadi bahan perdebatan. Apakah lokus perubahan

sosial di negara maju sebagai soko guru dan panutan bagi negara yang kurang berkembang melalui negara, agar rakyat ikut menikmati hasil perubahan itu? Ataukah, malah sebaliknya, yaitu, justru rakyat atau penduduk setempatlah yang harus melakukan perubahan dari bawah, dan negara melalui pemerintahnya hanya melakukan kanalisasi fasilitas dari segi kualitas hidup dan konstruksi ide-ide kemajuan dari suatu bangsa dari bawah secara endogen?

Pasca Perang Dunia kedua, sebagian pemikir, seperti Daniel Lerner, berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi seperti yang dilewati oleh negara-negara maju harus dan mutlak mesti berlaku bagi negara-negara berkembang juga. Kemajuan pesat yang dialami oleh negara-negara maju di belahan utara bumi ini harus ditularkan kepada negara-negara di belahan selatan yang masih ketinggalan, bila ingin mengikuti jejak negara-negara seniornya yang sudah berpengalaman menapaki cerita sukses. Pendekatan yang ditawarkan adalah pembangunan ekonomi dengan cara *top-down* (dari atas ke bawah). Dengan demikian, cara-cara otoriter tidak terhindarkan.

Model modernisasi ini meyakini bahwa negara maju itu berkembang karena telah melewati proses pembaharuan pemikiran dari tradisional, lokal, kuno, ketinggalan zaman, kepada pemikiran maju (*the idea of progress*) yang dimiliki oleh penduduk sebuah negara. Karena itu, unsur-unsur *tachayul*, *bid'ah* dan *churafat* (TBC) harus ditinggalkan. TBC ini pun menjadi jargon perubahan sosial yang populer. Faktor ekonomi pun dianggap sebagai komando pembangunan. Oleh karena dana pendukung ekonomi ini lemah di negara-negara yang dilanda kemiskinan ini, maka model modernisasi ini pun menawarkan solusi berupa pinjaman dari negara-negara maju kepada negara-negara yang kurang berkembang ini melalui pemerintah resmi. Maka istilah *Government (G) to Government (G)* menjadi sangat populer. *Trickle-down effect* (dampak menetes ke bawah) menjadi panutan, dengan harapan bahwa apabila pusat kekuasaan mengalami proses kapitalisasi, maka otomatis rakyat juga ikut menikmati kesejahteraan sebagaimana yang dinikmati oleh orang-orang di pusat kekuasaan, mengikuti jejak panutannya di negara-negara maju.

Namun, ternyata yang terjadi adalah tetesan itu tak kunjung turun, bahkan lubang tetesan tertutup rapat. Terjadi pengelem-bungan kekuasaan atas sumber-sumber ekonomi di kalangan elite negara. Elite politik malah melakukan kolusi dengan aparaturnegara di tingkat pusat, baik di kalangan birokrat maupun di kalangan militer, yang kebetulan bertindak sebagai pemeran dwifungsi sosial. Pelaku ekonomi pun yang kebetulan kebanyakan dari kalangan Tionghoa, yang kebetulan juga mengalami keterbatasan gerak sosial kecuali harus berbisnis, sehingga mereka tak ada pilihan kecuali harus ikut berkolusi dengan pihak penguasa. Maka terjadilah konspirasi berkelindan antara “penguasa” dan “pengusaha” yang dalam sebuah neologisme disebut *pengu(a)salha*, atau *entrepreneurulers* atau *rulerepreneurs*. Keduanya telah meraup keuntungan besar dari sumber-sumber kehidupan negara. Efeknya adalah “yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin.” Gap yang menganga antara keduanya nampak jelas. Model piramida tergambar jelas, yang puncaknya dilakoni hanya segelintir saja, dan di tengah pun terjepit dan berkerut, dan yang terbesar melebar adalah di bagian bawah yang merupakan rakyat Indonesia secara umum. Bahkan, lebih runyam lagi, karena utang-utang tadi ternyata dibebankan kepada negara, maka rakyatlah yang harus menanggungnya.

Kondisi ini diperparah dengan desakan para penganut teori ketergantungan (*dependency*), yang mencoba melakukan kritik pedas terhadap para pendukung teori modernisasi ini. Pendukung model ketergantungan ini meyakini bahwa mana mungkin negara-negara di Dunia Ketiga bisa maju apabila semua sumber kehidupan ekonomi dikuasai negara-negara maju. Karena itu, tak akan ada perubahan sosial di negara-negara berkembang tanpa campur tangan negara-negara maju.

Efek dari pendekatan ekonomi ini kemudian, malah membuat utang negara-negara di Dunia Ketiga membengkak. Utang Indonesia saat ini sudah mencapai Rp 2500 triliun yang bila dibagi dengan 250 juta penduduk Indonesia, maka setiap warga negara telah menanggung utang sebesar Rp100 juta. Seorang anak yang belum

lahir pun sudah harus menanggung utang yang dia sendiri tidak menyadarinya.

Oleh karena itu, sebuah kesadaran baru di kalangan ahli komunikasi internasional untuk menyahuti persoalan ketimpangan ini mencuat di permukaan. Maka muncullah ide Tata Ekonomi Dunia Baru (*New World Economic Order*), dalam rangka menata ulang ketimpangan ekonomi di muka bumi ini. Namun, ini pun ternyata ditentang keras negara-negara maju, terutama Amerika Serikat (AS), karena yang terakhir ini meyakini bahwa dunia ini adalah medan laga perekonomian liberal, yang terbuka buat siapa saja. Inilah kemudian yang dikenal dengan imperialisme gaya baru, atau lebih tepatnya adalah penjajahan kultural. Bukan lagi penjajahan fisik dan *de facto* wilayah yang dikuasai secara langsung, namun penjajahannya tidak kasat mata, karena berada di ranah kerja manusia-manusia kreatif dalam bentuk kebudayaan baru, berupa ekonomi, industri, film, musik, seni, olahraga, dan terakhir adalah teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kondisi ini membuat negara-negara di Dunia Ketiga semakin tertinggal jauh dalam hal ekonomi, sementara dalam aspek lain pun malah tak tersentuh karena sudah mengalami proses kolonialisasi budaya.

Karena itu, model baru pun mencabar, dengan memelopori pendekatan holistik, yang disebut dengan model multiplisitas (*multiplicity model*). Model ini menekankan pentingnya menyahuti aspek “ipoleksosbudhankamnasrata,” yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, nasionalisme, atas nama rakyat semesta secara merata. Jadi, bukan hanya aspek ekonomi yang diperjuangkan sebuah negara, tetapi semua aspek kehidupan manusia. *Non-governmental organization (NGO)* pun menjadi lokomotif perubahan sosialnya. Bahkan, Indonesia mencatat tak kurang dari 4000 *NGOs* di era Orde Baru, dalam rangka untuk menciptakan partisipasi luas rakyat Indonesia.

Namun, pendekatan ini pun ternyata juga gagal mencapai pemerataan pembangunan, atau seperti yang disebut Cak Nur, gagal membagi rata “kue” pembangunan di negara ini. Pendekatan yang bermula dengan penguatan produksi, baru disusul dengan

penekanan pada pertumbuhan, baru melakukan pemerataan hasil pembangunan, memang tak akan pernah bisa terjadi. Sekalipun, usaha untuk membalik pedekatan ini dengan cara mendahulukan pemerataan kesempatan kerja dan sumber daya alam, barulah diharapkan bisa melakukan pertumbuhan ekonomi, baru pada gilirannya melahirkan produksi masif, ternyata memang semuanya pun gagal. Semuanya memang disebabkan karena dilakukan dengan pedekatan Bapak dan Ibu — Paksaan dan Bujukan — koerseduksi (*coerseduction*).

Kemudian para pemikir komunikasi internasional pun menawarkan sebuah paradigma terbalik. Bila pedekatan modernisasi, dependensi, dan multiplisitas masih mengandalkan kekuatan perubahan sosial dari luar, dari negara maju, melalui pemerintah resmi yang dilakukan secara *top-down* dan otoriter, maka jangan harap sebuah negara, seperti Indonesia ini, akan berubah nasib. Oleh karena itu, pedekatan yang ditawarkannya adalah resepsi aktif dari penduuduk Indonesia secara keseluruhan yang menekankan pada aspek kualitas hidup manusia. Mereka harus bisa membantu diri mereka sendiri (*self-help strategy*). Strategi ini sebetulnya sesuai dengan firman Allah *swt.*: “*Sesungguhnya Tuhan tak akan mengubah nasib sebuah bangsa, hingga bangsa itu sendiri mau mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri*” (Q 13: 11). Bahkan, dalam QS al-Anfal (8: 53) dikatakan: “*Yang demikian (siksaan) itu adalah karena sesungguhnya Tuhan sekali-kali tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada sesuatu bangsa, hingga bangsa itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah adalah Yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui*” (Q 8: 53).

## Pembangunan Manusia Seutuhnya

Pemikiran pembangunan juga menjadi perdebatan para ahli komunikasi internasional. Mereka memperdebatkan, siapakah sebetulnya yang menjadi aktor terjadinya sebuah proses pembangunan?

Tak lama setelah Perang Dunia Kedua juga, ide beragam tentang soal ini bermunculan satu persatu. Ide paling awal adalah yang dikemukakan oleh Everett Rogers, yang dia sebut sebagai difusi inovasi (*diffusion of innovations*). Ide ini meyakini bahwa bila sebuah bangsa atau negara ingin membangun diri, maka kuncinya adalah negara yang berteknologi tinggi harus menyebarkan temuan-temuannya dalam bentuk sains dan teknologi kepada Dunia Ketiga. Dengan cara ini, maka negara-negara yang kurang berkembang akan mengikuti jejak negara-negara yang sudah berkembang pesat.

Namun, negara-negara yang sedang berkembang ini mengalami persoalan besar karena teknologi ini tidak murah. Akibatnya, sumber daya alam (SDA) mereka menjadi barternya. Tenaga ahli pun harus didatangkan untuk mengolah SDA ini yang tentu saja memerlukan peralatan canggih dan dana yang tak sedikit. Akibatnya, keuntungan ternyata tak berpihak kepada negara-negara pemilik SDA ini, tetapi justru sebagian besar mengalir ke negara-negara pemilik teknologi dan dana besar, yaitu negara-negara maju.

Oleh karena itu, muncul kesadaran baru di kalangan para ahli komunikasi internasional untuk memperkenalkan pendekatan pemasaran sosial (*social marketing*). Model ini memperkenalkan apa yang disebut dengan *small but beautiful* (kecil tapi indah). Pendekatan ini meyakini bahwa format teknologi kecil yang murah meriah dapat membantu negara-negara di Dunia Ketiga menyelesaikan soal kemampuan daya beli ini terhadap produk teknologi. Model ini segera ditangkap oleh Jepang, dan kemudian disusul oleh negara-negara Asia Timur lain seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Hongkong. Mereka mengambil manfaat dengan strategi pembangunan bangsa. Bukan hanya bermanfaat untuk pembangunan internal di negeri mereka, tetapi model ini menawarkan sebuah harapan agar negara-negara di Dunia Ketiga dapat menikmati kemurahan hasil produksi ini.

Namun, ternyata nasib pembangunan di negara-negara berkembang tidak seindah (*beautiful*) nama pendekatan ini, malah aspek kecil (*small*)-nya malah semakin tampak di tengah kebesaran negara-negara maju. SDA mereka habis terkuras, sedangkan

pembangunan negara mereka terseok-seok. Bahkan keadaan yang memprihatinkan ini diperparah oleh utang yang berlapis-lapis ini, dan ditambah parah lagi dengan karakter korupsi para petinginya.

Para pemikir komunikasi internasional pun tak habis ide untuk menawarkan pendekatan baru. Mereka mengajukan model partisipasi dalam pembangunan teknologi dengan harapan dapat mengikuti jejak senior mereka di Asia Timur. Negara Komunitas Ekonomi Baru (*New Economic Communities* [NECs]) pun muncul. *Reassembly* atas teknologi baru pun digagas di negara-negara selatan ini. Tak ketinggalan, Indonesia pun ikut mengasembli, sehingga produk Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Isuzu, dan lain-lain tidak lagi diasembli di negara asalnya di Jepang, misalnya, tetapi sudah dibuat di Indonesia.

Namun, ternyata keuntungannya tidak banyak dinikmati oleh bangsa Indonesia, karena memang dana dan proses pembuatannya semuanya ditalangi oleh negara asal tadi, sehingga sebagian besar hasil penjualannya dan tentu keuntungannya kembali ke negeri Sakura itu. Bahkan, Indonesia, seperti halnya negara berkembang lain, berfungsi sebagai bak sampah teknologi yang ternyata memang ketahanannya tidak bisa berlangsung lama. Lagi-lagi, hasilnya tak seindah dengan warna aslinya. Bentuknya memang kecil, tapi kalau ditumpuk, lama-lama menjadi bukit sampah, dan rongsokan besi tua.

Akhirnya, muncul ide baru dengan mengedepankan kreativitas masyarakat setempat. Model ini disebut dengan *self-sufficiency strategy*. Teknologi harus lahir dari rahim masyarakat itu sendiri bila ingin menikmati sebuah pembangunan yang sesungguhnya. Inilah sebetulnya yang dilakukan oleh Jepang, dan inilah yang dilakukan oleh negara-negara maju di Amerika Utara, di Eropa Barat, dan di Australia. Mereka menciptakan teknologinya sendiri, dengan biaya sendiri, dengan tenaga ahli sendiri yang sudah terlatih di negara maju atau di negara sendiri atas didikan alumni-almuni dari luar yang sudah berpengalaman. Ini pulalah sebetulnya yang ingin dirintis oleh B. J. Habibie dengan proyek IPTN-nya. Beliau

berkeyakinan bahwa kita harus langsung sejajar dengan negara-negara maju dalam hal teknologi tercanggih, seperti pesawat terbang, lalu kita kejar dan pacu teknologi-teknologi kecil lain dalam lapangan pertanian, transportasi darat dan laut, kesehatan, TIK, dan lain-lain. Dananya harus diupayakan dari dalam negeri sendiri tanpa bantuan dari luar. Ekonomi kerakyatan harus diutamakan. Sayang, proyek Habibie ini yang sebetulnya sesuai dengan perkembangan pemikiran komunikasi mutakhir harus berakhir.

Kemampuan manusia dalam menguasai suatu cabang keahlian, keterampilan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sangat diperlukan untuk mendukung produktivitas. Kemampuan tersebut perlu terus diperbaharui dan diremajakan sejalan dengan perubahan aspirasi dan teknologi yang berlangsung tiada henti. Dengan kemampuan itu, sumber daya manusia (SDM) selalu dapat mengikuti bahkan menjadi pelopor untuk melakukan inovasi dan perubahan. Dalam kaitan ini, pembangunan tidak hanya berperan dalam peningkatan penguasaan keahlian dan keterampilan dalam iptek, tetapi juga mengembangkan nilai dan sikap yang mendorong tumbuh-kembangnya kemampuan belajar sepanjang hayat. Terkait hal ini, tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintahan kita terfokus hanya di wilayah pusat. Peningkatan pengembangan SDM dan iptek hanya menyentuh pulau Jawa saja, sementara pulau lain tidak mendapatkan perlakuan serupa dari pemerintah pusat.

Selama masa pemerintahan negara ini, rakyat menyaksikan kemajuan pembangunan secara fluktuatif dalam berbagai bidang. Kemajuan yang sudah dicapai pada suatu titik waktu tertentu sering tidak menjadi landasan bagi kemajuan yang harus dicapai pada waktu berikutnya. Prof. Sumitro Djojohadikusumo (*Kompas*, Oktober 1992) bahkan pernah menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan tidak cerah jika tidak dapat dibenahi inti permasalahannya. Kemampuan dasar sektor ekonomi Indonesia dalam memproduksi masih terbatas. Perbaikan dan penambahan infrastruktur industri seperti komunikasi, transportasi, energi, dan lain-lain memang sangat dibutuhkan. Namun yang lebih utama adalah penyiapan unsur SDM sebagai pelaku ekonomi. Jika

ingin mewujudkan modernisasi, maka pengembangan SDM sebagai pelaku ekonomi harus dilakukan,

Pemerintah Indonesia masih cenderung menggunakan sistem *trickle-down effect*, sebuah sistem perekonomian peninggalan para kapitalis, yang dianut oleh Indonesia sejak zaman Orde Baru hingga saat ini. Istilah *trickle-down effect* pertama kali dikutip oleh seorang tokoh politik dunia, yaitu Ronald Reagan (Presiden Amerika Serikat ke-40) dalam suatu pidato kepresidenannya, saat ia mengumumkan pemotongan pajak besar-besaran bagi orang kaya, suatu keistimewaan yang dianggap akan “merembes” ke seluruh rakyat. *“The tricle-down effect is a now-discredited theory of distribution which holds that the concentration of wealth in a few hands benefits the poor as the wealth necessarily tricles-down to them, mainly through employment generated by the demand for personal service and a result of investments made by the wealthy”* (Levy and Weitz, 2009). Sistem ini dianggap sebagai sistem perekonomian yang paling ideal untuk memajukan perekonomian suatu bangsa, karena pola ekonominya yang dianggap dapat menyejahterakan bangsa dari level atas hingga paling bawah. *Trickle-down effect* ini cukup terkenal dan dipakai oleh banyak negara maju dan diadopsi oleh negara-negara berkembang.

Menganut sistem ini, pemerintah kita cenderung memberikan akses dan kemudahan bagi kelompok orang kaya di negeri ini. Tujuannya adalah agar kelompok elite tersebut kelak akan memberikan peluang (seperti lapangan pekerjaan dan bantuan beasiswa pendidikan) bagi kelompok non-elite miskin agar dapat menjadi kaya. Namun kenyataan yang terjadi sampai saat ini adalah bahwa sistem ini sama sekali tidak membuahkan hasil nyata bagi kemajuan negeri ini. Kelompok kapitalis yang sudah diperkaya dan diberi akses oleh negara, bukan saja tidak membantu rakyat miskin, namun mereka justru makin sibuk memperkaya diri sendiri tanpa memedulikan rakyat yang mayoritas berada di bawah garis kemiskinan.

Apa yang disinggung oleh Cak Nur mengenai sikap Soekarno dan Soeharto terkait dengan apa yang disebut beliau sebagai pembagian

“kue nasional” jelas menyiratkan bahwa sistem kesejahteraan yang dipraktikkan dari atas ke bawah (*top-down*) dengan *trickle-down effect* tidak membuahkan hasil. Penerapan sistem ini dan kenyataan yang terjadi di lapangan justru telah menimbulkan letupan gejolak sosial yang jelas menunjukkan indikasi adanya kejengkelan dan kekecewaan atas perilaku ketidakadilan.

Pembangunan bangsa secara berkesinambungan (*sustainable development*) hanya akan dapat dicapai jika pemerintah menitik-beratkan perhatian pembangunan kepada faktor manusia. Pembangunan berkelanjutan akan tercipta jika para pelaku ekonomi dapat memelihara dan mengembangkan nilai budaya produktif secara terus-menerus. Pengembangan budaya produktif ini akan dapat dicapai jika SDM dikelola dalam iklim yang kondusif bagi para pekerja untuk belajar secara terus-menerus, melakukan inovasi dalam bekerja, dan selalu berorientasi terhadap kecerdasan.

Dalam kaitannya dengan proses pembangunan bangsa, SDM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari faktor produksi (pekerja yang dapat mendukung produktivitas) di dalam suatu sistem produksi. Dengan mendidik SDM melalui berbagai fasilitas yang seharusnya disediakan oleh negara, SDM dapat menjadi pemacu perubahan dan produktivitas baik bagi dirinya sendiri maupun bagi kelompok masyarakatnya. Dengan demikian, masyarakat dapat mendayagunakan diri dalam menolong diri sendiri (*self-help*) untuk meningkatkan kesejahteraan diri mereka. Bila hal ini dapat terwujud, maka dengan sendirinya, kesejahteraan dari level bawah tersebut akan merambat naik hingga ke level teratas (*bottom-up*).

Titik berat pembangunan nasional pada pengembangan kualitas SDM harus menjadi komitmen penting pemerintah. Untuk terwujudnya kemandirian SDM, perlu dibentuk manusia dan masyarakat yang memiliki nilai dan sikap yang tanggap terhadap perubahan, memiliki semangat untuk melakukan inovasi dalam kegiatannya sehari-hari, dan dapat menghargai karya anak bangsa yang bermutu. Pendekatan ini biasa juga disebut dengan pembangunan umat (*community development*). Kelihatannya, ini sesuai dengan firman Allah *swt*: “Dan hendaklah ada di antara

kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung” (Q 3: 104). “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah” (Q 3: 110).

Intinya adalah bahwa pembangunan manusia seutuhnya dalam bingkai keumatan harus diarahkan kepada kualitas hidup berupa kebaikan, keimanan, kearifan lokal, dan menjauhi kemungkar lokal.

## **Membingkai Kembali Perlakuan kepada Etnis Tionghoa**

Cak Nur menggarisbawahi perilaku yang ditunjukkan oleh Soekarno dan Soeharto dalam menyikapi masalah keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Pada era Soekarno, tidak ada suatu golongan sosial-ekonomi, termasuk golongan etnis Tionghoa, yang diunggulkan atas yang lain. Bidang kewirausahaan atau *entrepreneurship* juga tumbuh dalam masyarakat tanpa hak istimewa. Indonesia di bawah pemerintahan Soekarno memiliki kepentingan strategis terhadap etnis Tionghoa.

Mungkin tanpa disadari sepenuhnya atau barangkali atas pertimbangan yang belum diketahui, Soeharto melanjutkan agenda Soekarno. Rezim Soeharto mengharuskan pemerintah mengikuti kebijakan untuk menyerahkan kegiatan pembangunan ekonomi sektor swasta kepada mereka yang “kompetitif” dan mempunyai kemampuan yang handal (termasuk penilaian “*bankability*”). Otomatis, ini artinya tertuju kepada para pelaku ekonomi dari kalangan warga masyarakat kreatif keturunan Tionghoa, karena merekalah yang sampai saat itu dan bahkan kini, memenuhi persyaratan tersebut. Etnis ini, sekalipun hanya berpopulasi 4 (empat) persen, namun mereka telah menguasai 70 persen perekonomian Indonesia.

Kondisi ini tentu saja, senada dengan yang diungkapkan Cak Nur, menimbulkan permasalahan tersendiri. Jurang antara

kelompok etnis Tionggok dan pribumi semakin melebar. Belum lagi jika ditambah dengan peristiwa kerusuhan besar-besaran di tahun 1998 saat kejatuhan Soeharto yang juga berdampak pada eksodus masal kelompok masyarakat Tionghoa akibat maraknya penjarahan, pemerkosaan dan tindakan kriminal yang mengancam diri mereka.

Sebenarnya, jurang sosial yang memisahkan kelompok Tionghoa dan pribumi ini dapat dihindari. Harus diakui, etnis Tionghoa memiliki etos kerja yang sangat bagus. Mereka adalah kelompok pekerja keras, gigih, ulet, dan rajin. Etos ini boleh jadi dipengaruhi oleh Khonghucu, namun bisa diadopsi oleh seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki ajaran agama yang menekankan aspek dan karakter seperti ini. Bersama-sama, seluruh rakyat Indonesia dapat menerapkan etos ini untuk meningkatkan pembangunan bangsa.

Di sisi lain, pemerintah juga dapat memberlakukan *New Vision Policy* yang diterapkan oleh pemerintah Malaysia sebagai kelanjutan dari sistem *New Economic Policy* pasca pembantaian masal etnis Tionghoa di Malaysia di tahun 1969. Sistem ini memusatkan ekonomi dan pendidikan kepada masyarakat pribumi, sementara keturunan Tionghoa diberi kesempatan untuk menjadi pejabat secara terbatas. Pemerintah Malaysia juga mewajibkan perusahaan Tionghoa mengangkat bumiputera (anak negeri, penduduk asli) sebagai manager perusahaan mereka. Selain itu, pemerintah Malaysia juga menerapkan kewajiban membayar pajak yang lebih tinggi kepada kaum pengusaha keturunan Tionghoa serta mewajibkan mereka memberikan lapangan pekerjaan dan santunan untuk program beasiswa bagi pendidikan masyarakat bumiputera. Dengan adanya sistem ini, diharapkan kesenjangan sosial yang terjadi di antara kedua kelompok etnis dapat diminimalisir. Seluruh rakyat dapat bekerja sama dalam iklim pembangunan negara yang sehat. Jika pemerintah Indonesia dapat mengadopsi sistem ini, maka keharmonisan iklim kerja antara etnis Tionghoa dan pribumi dapat tercipta.

## *Civic Morality*

Belum lama berselang, kita disuguhkan oleh media berita-berita mengenai isu network kekuasaan sebuah *classical democracy* oleh Ratu Atut Chosiyah dan keluarganya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kini juga nampak tengah membangun dinasti serupa dengan masa pemerintahan Soeharto. Melalui pernyataannya dalam makalah ini, Cak Nur menilai bahwa Soeharto jatuh karena alasan *civic morality*, khususnya berupa berbagai penyelewengan dalam akronim KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Praktik KKN ini begitu menjamur dalam sendi bernegara. Hal ini juga dilakukan oleh SBY yang sering diidentikkan dengan nama Cikeas, daerah tempat beliau tinggal.

Dinasti Cikeas telah bertumbuh dalam sepuluh tahun masa pemerintahan SBY. Sebut saja, nama caleg yang merupakan kerabat dekat keluarga Cikeas, yakni Edhi Baskoro Yudhoyono (anak SBY), dari Dapil Jatim VII; Sartono Hutomo (sepupu SBY), dari Dapil Jatim VII; Hartanto Edhi Wibowo (adik ipar SBY), dari Dapil Banten III; Agus Hermanto (adik ipar SBY), dari Dapil Jateng I; dan Nurcahyo Anggorojati (anak Hadi Utomo yang juga ipar SBY), dari Dapil Jateng VI. Selanjutnya, ada nama Lintang Pramesti (anak Agus Hermanto), dari Dapil Jabar VIII; Putri Permatasari (keponakan Agus Hermanto), dari Dapil Jateng I; Dwi Astuti Wulandari (anak Hadi Utomo), dari Dapil DKI Jakarta I; Mexicana Leo Hartanto (keponakan SBY), dari Dapil DKI Jakarta I; dan Decky Hardijanto (keponakan Hadi Utomo), dari Dapil Jateng V. Kemudian, ada pula nama Indri Sulistiyowati (keponakan Hadi Utomo), dari Dapil NTB; Sumardani (suami Indri Sulistiyowati), dari Dapil Riau I; Agung Budi Santoso (keluarga Hadi Utomo), dari Dapil Jabar I; Sri Hidayati (adik ipar Agung BS); dan Putut Wijanarko (suami Sri Hidayati), dari Dapil Jatim VI.

Berkaca dari sejarah Indonesia yang ditampilkan Cak Nur, munculnya dinasti ini, bila tidak berubah signifikan, tidak mustahil akan kembali berdampak sama seperti pada masa pemerintahan

Soeharto. Mereka telah menjadi raja-raja kecil yang menyebabkan Indonesia seakan-akan masih jalan di tempat. Selain kemudahan akses berusaha hanya bertumpu pada kalangan keluarga dan kroni, pemerataan pembangunan juga semakin jauh panggang dari api. Masih banyak wilayah yang memiliki angka kemiskinan tinggi dan sarana infrastruktur yang masih sangat kurang. Bila mengikuti standar Bank Dunia, maka separuh penduduk Indonesia masih miskin, dengan penghasilan 2 USD se hari. Padahal, Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang luar biasa besar. Namun pada kenyataannya, keadilan dan kemakmuran belum merata dan belum dapat dinikmati seluruh bangsa Indonesia, karena memang, di era Orde Baru, pemerataan menjadi proses terakhir, setelah produksi dan pertumbuhan ekonomi. Kendati telah dibalik menjadi pemerataan dahulu, baru pertumbuhan dan produksi, pendekatan inti sudah terlanjur terlambat, setelah kekecewaan demi kekecewaan telah menimpa hati bangsa ini. Ini berarti walau secara *de jure* Indonesia bebas dari penjajahan, tapi secara *de facto*, rakyat tetap terjajah oleh kekuatan tersembunyi, yaitu penjajahan kultural dan ekonomi yang meliputi semua unsur kehidupan bangsa ini. Berbagai subsidi yang dicanangkan juga masih banyak tidak tepat sasaran.

Pada dasarnya, sistem manajemen pembangunan nasional merupakan perpaduan antara tata nilai, struktur, dan proses untuk mencapai kehematan, daya guna, dan hasil guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber daya alam, dana, dan daya nasional demi mencapai tujuan pembangunan nasional. Proses penyelenggaraan yang serasi dan terpadu, yang meliputi rotasi kegiatan perumusan kebijakan (*policy formulation*), pelaksanaan kebijakan (*policy implementation*), dan penilaian hasil kebijakan (*policy evaluation*) terhadap berbagai kebijakan nasional juga perlu diformat secara cermat agar dapat berberkat, dan penuh makrifat.

Menilik dari ketiga poin di atas, maka kalimat pemungkas yang diungkapkan Cak Nur sangatlah pantas untuk kita hayati bersama. Sebuah kemajuan bangsa hanya akan dapat terwujud oleh

adanya kesadaran bersama oleh seluruh sendi lapisan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan memerlukan partisipasi yang tulus dari semua warga negara berlandaskan rasa memiliki dan ikut bertanggung jawab menjaga dan mengembangkan negara. Tentu saja, pemimpin yang amanah (memiliki *civic morality*) juga memainkan peranan yang amat vital dan krusial dalam hal ini. ❖

**Andi Faisal Bakti** adalah Guru Besar Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekarang ia menjabat posisi sebagai Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila, Jakarta.